

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR
PROVINSI JAWA BARAT

NOTULEN

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SOSIALISASI SATGAS SABER PUNGLI
PROVINSI JAWA BARAT KEPADA PARA LURAH, DAN KEPALA DESA SE-
WILAYAH PRIANGAN TIMUR DENGAN TEMA “DENGAN SAPU BERSIH
PUNGLI KITA WUJUDKAN BEKERJA TANPA PUNGLI”**

I. PEMBUKAAN

Kegiatan dilaksanakan pada :

- Hari / tanggal : Kamis, 25 Juli 2019
- Jam : Pukul 08.00 Wib s.d Pukul 15.00 Wib
- Tempat : Hotel Santika Kota Tasikmalaya Jl. Yudanagara Kec. Cihideung Tasikmalaya Jawa Barat
- Pimpinan : Sekretaris II Satgas Saber Pungli Prov. Jabar AKBP Dr. A. Rusman, S.H., M.H.
- Tamu Undangan : Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Bpk. Drs. H. Ivan Dicksan Hassanudin, M.Si
- Narasumber : Ketua Kelompok Ahli Satgas Saber Pungli Prov. Jabar Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA, Sekretaris III Satgas Saber Pungli Prov. Jabar Jaksa Madya Otong Hendra Rahayu, S.H., M.H., Kabid Ops Satgas Saber Pungli Prov. Jabar AKBP Harso Pudjo Hartono, S.H.
- Peserta Sosialisasi : Para Lurah dan Kepala Desa se-wilayah Priangan Timur, serta UPP Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran, dan Kab. Banjar yang seluruhnya berjumlah 330 orang.

II. PELAKSANAAN

II. PELAKSANAAN

- A. Laporan Ketua Penyelenggara Kapokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat yang diwakilkan kepada Sekretaris I Pokja Pencegahan Ir. Hemansyah, M.Si.
- B. Sambutan Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli yang dibacakan oleh Sekretaris II AKBP Dr. A. Rusman, S.H., M.H., yang intinya sebagai berikut:
1. Pemerintahan Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla, telah menetapkan “Nawacita” sebagai agenda prioritas pembangunan, guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian;
 2. untuk mewujudkan cita-cita besar itu, diperlukan kerja nyata tahap demi tahap, dimulai dengan pembangunan pondasi dan dilanjutkan dengan upaya percepatan di berbagai bidang;
 3. pada tahap awal, percepatan tersebut difokuskan pada bidang ekonomi, khususnya percepatan pembangunan sektor infrastruktur, pembangunan manusia, dan demikian hal nya saat ini sedang berlangsung program percepatan pembangunan dan peningkatan di desa dengan diluncurkannya Dana Desa;
 4. Satgas Saber Pungli Prov. Jabar berupaya berinovasi dengan membuat sistem aplikasi berbasis IT dan program kegiatan sebagai berikut:
 - **Siberli (Sistem Informasi Saber Pungli)**, merupakan suatu sistem informasi berbasis internet/web yang sedang dibangun oleh UPP Prov. Jabar dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat mengirimkan laporan pengaduan Pungli;
 - **Saber Pungli Masuk Desa**, program kawal dana desa / alokasi dana desa;

- Saber

- ***Saber Pungli Masuk Sekolah***, merupakan suatu program yang dengan tujuan untuk mencegah adanya praktek pungutan liar di lingkungan sekolah;
 - ***Beranda Saber Pungli***, program *talk show* di radio.
5. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan menyamakan persepsi dalam pemberantasan pungutan liar, sehingga adanya pemahaman yang sama antara Satgas Saber Pungli Provinsi dan Unit Pemberantasan Pungutan liar di Kota / Kabupaten, serta dapat membangun komitmen pemberantasan anti pungli melalui kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat.
- C. Pembukaan dan Sambutan Walikota Tasikmalaya yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Bpk. Drs. H. Ivan Dicksan Hassanudin, M.Si., yang intinya sebagai berikut :
1. Praktek pungutan liar (Pungli) merupakan hal yang tidak terpuji dan musti kita tangani dengan baik.
 2. Pungli sudah menjadi rahasia umum bahwa di setiap tempat pelayanan publik, baik pemerintah maupun non pemerintah berlangsung secara terbuka, kondisi ini tidak bisa dibiarkan harus ada tindakan tegas.
 3. Kegiatan sosialisasi ini merupakan suatu implementasi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk memberantas adanya pungutan liar.
 4. Sebagaimana kita maklumi bersama, bahwa para Lurah dan Kepala Desa merupakan pelayan masyarakat yang berada pada tingkat yang paling depan.
 5. Melalui kegiatan sosialisasi ini, seluruh peserta agar dapat mengikuti dan dapat meningkatkan komitmennya memberantas Pungli di wilayah masing-masing, sehingga diharapkan pelayanan publik dapat meningkat, dan investasi semakin baik.

6. Diharapkan

6. Diharapkan semua peserta dapat mengejawantahkan pengetahuan yang didapat dari kegiatan sosialisasi ini, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi optimal dan tidak dibebani dengan biaya-biaya yang harusnya tidak ada.
 7. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim kegiatan sosialisasi kepada para Lurah dan Kepala Desa se-wilayah Priangan Timur dengan tema “Dengan Sapu Bersih Pungli Kita Wujudkan Bekerja Tanpa Pungli “ secara resmi dibuka.
- D. Paparan Sosialisasi Satgas Saber Pungli Prov. Jabar yang disampaikan oleh para Narasumber dengan moderator Sekretaris II Pokja Pencegahan AKBP Drs. Adie Sumarwan, S.S.T., M.K., yang intinya sebagai berikut:
1. Paparan yang disampaikan oleh Kabid Ops Satgas Saber Pungli Prov. Jabar AKBP Harso Pudjo Hartono, S.H., yang intinya sebagai berikut :
 - a. Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
 - b. Fungsi-fungsi Satgas Saber Pungli:
 - Pokja Intelijen;
 - Pokja Pencegahan;
 - Pokda Penindakan; dan
 - Pokja Yustisi.
 - c. Tugas Satgas Saber Pungli, melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
 - d. Wewenang Satgas Saber Pungli:
 - membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 - melakukan

- melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
 - mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
 - melakukan Operasi Tangkap Tangan;
 - memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Pemerintah Daerah; dan
 - melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar.
- e. Sasaran Kegiatan Satgas Saber Pungli:
- Sektor Pelayanan Publik;
 - Sektor Export dan Impor;
 - Sektor Penegakkan Hukum;
 - Sektor Perijinan;
 - Sektor Kepegawaian;
 - Sektor Pendidikan;
 - Pengadaan barang dan jasa;
 - serta kegiatan Pungli lainnya.
- f. Target Kegiatan Satgas Saber Pungli:
- Aparatur Negara yang bertugas pada sektor pelayanan;
 - Aparat Penegak Hukum;
 - Aparatur Negara sebagai calo / makelar kasus;

- Aparatur

- Aparatur Negara sebagai *backing* dalam Pungli;
 - Mafia hukum dan mafia pajak;
 - oknum masyarakat yang terkait Pungli.
2. Paparan yang disampaikan oleh Sekretaris III Satgas Saber Pungli Prov Jabar Jaksa Utama Madya Otong Hendra Rahayu, S.H., M.H., yang intinya sebagai berikut :
- a. Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korup, akibatnya masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik Pungli dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. Praktik Pungli semakin membudaya dan tak terkendali, budaya ini sudah merasuk ke hampir semua instansi yang melayani urusan dan kepentingan publik, baik instansi di tingkat pusat maupun di daerah, para oknum di instansi itu sepertinya saling berlomba untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan jabatan yang ada pada dirinya, baik yang dilakukan sendiri maupun berjamaah;
 - c. Siklus kehidupan yang membutuhkan pelayanan publik rentan terhadap Pungli, mulai dari lahir sampai kematian, diantaranya pengurusan akta kelahiran, pendaftaran dan biaya sekolah, pengurusan KK, KTP, SIM, mencari pekerjaan, pengurusan pernikahan, pengurusan skep jabatan, surat pensiun dan pengurusan surat kematian.
 - d. Faktor – faktor penyebab Pungli secara umum:
 - 1) penyalahgunaan wewenang, jabatan adalah kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan Pungli;
 - 2) faktor

- 2) faktor mental, karakter adalah kelakuan dari pada seseorang dalam mengontrol dirinya sendiri;
 - 3) faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas / jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan Pungli;
 - 4) faktor kultural dan budaya organisasi, budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuapan dapat menyebabkan Pungli sebagai hal biasa;
 - 5) terbatasnya sumber daya manusia;
 - 6) lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.
- e. Upaya Pencegahan Praktek Pungli:
- 1) pre-emptif, meliputi membangun budaya anti Pungli dan meningkatkan sosialisasi;
 - 2) preventif, meliputi pemetaan rawan pungli, pengawasan internal, dan sistem pelayanan publik berbasis IT;
 - 3) menindak tegas oknum aparat dan masyarakat.
- f. Dalam melaksanakan pemberantasan Pungli, Satgas Saber Pungli sangat mengandalkan peran aktif masyarakat.
3. Paparan yang disampaikan oleh Ketua Kelompok Ahli Satgas Saber Pungli Prov Jabar Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA, yang intinya sebagai berikut :
- a. Prinsip Dasar 1. Bekerja Tanpa Pungli
- Penyelenggaraan layanan publik yang bermutu dan akuntabel:
- 1) bermutu, artinya pelayanan publik yang melebihi harapan (*beyond the expectation*);
 - 2) akuntabel

- 2) akuntabel, artinya :
 - taat terhadap aturan;
 - dikerjakan oleh ahlinya;
 - berorientasi kepada mutu layanan publik yang lebih baik dari waktu ke waktu

b. Prinsip Dasar 2. Bekerja Tanpa Pungli

- 1) Aparatur dengan Ciri: Integritas, Profesional, dan Melayani.
 - 2) Tumbuhnya Kultur Kerja Baru:
 - memiliki daya tahan terhadap tekanan yang tinggi (*Endurance*);
 - menjunjung tinggi martabat diri dan institusi (*Dignity*).
 - 3) Hasil yang membanggakan dan berorientasi dan bermental juara;
 - 4) Dukungan fasilitas kerja pada Era Generasi 4.0;
 - 5) Kesejahteraan aparatur beserta keluarganya;
 - 6) Lembaga berperan sebagai tempat pembelajaran dan sebagai rujukan.
- c. Mitra Saber Pungli Jabar, mampu tiga M: Mandiri, Mengembangkan diri, dan Melapor.
- d. Tiga kondisi pendorong utama terjadinya Pungli oleh seseorang, yaitu ada kesempatan, niat diri, dan tekanan eksternal.
- e. Ajakan: Jadilah Pelopor Bekerja Tanpa Pungli Di Jawa Barat.

E. Dilanjutkan diskusi, dengan materi diskusi sebagai berikut :

1. Mengapa dalam memberikan pelayanan kepada warga desanya kerap kali masih terjadi adanya Pungli oleh aparat di desa?

Jawaban

- ❖ Jawaban Sdr. Ivan Abdul Jalal dari Desa Kujang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, memberikan jawaban yang intinya sebagai berikut :

Masih adanya Pungli oleh aparat di desa, dikarenakan :

- faktor kesejahteraan khususnya penghasilan kepala desa dan perangkat desa yang kurang mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan saat ini, antara Rp.2.000.000,- s.d Rp.3.000.000,-
- rendahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pelayanan, masyarakat pada umumnya ingin segera beres, tidak mau untuk mengurus sendiri sesuai prosedur, karena minimnya pengetahuan untuk mengakses sentra pelayanan, sehingga memaksa perangkat desa untuk mengurusnya, yang pada akhirnya terpaksa memungut biaya di luar ketentuan untuk keperluan transportasi, biaya fotocopi berkas, dll;

- ❖ Jawaban dari Sdr. Idis Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, memberikan jawaban yang intinya sebagai berikut :

Baik warga maupun perangkat desa sama-sama membutuhkan, contohnya dalam pengurusan kesehatan (operasi) yang lama bisa dilaksanakan segera dengan memberikan fee ke pihak rumahsakit.

- ❖ Jawaban dari Sdr. Umar Hamzah Malangbong Garut, memberikan jawaban yang intinya sebagai berikut :

Saber Pungli harus paham terhadap permasalahan tersebut juga dipikirkan, jangan jadikan aparat desa sebagai sasaran. Jadi kebijakan harus diiringi dengan peningkatan kemampuan, fasilitas dan finansial.

2. Apa yang melatarbelakangi para aparat desa (Kepala Desa / Lurah) dan staf aparat di desa tidak mau melaporkan adanya dugaan Pungli yang terjadi di lingkungan / di desanya?

❖ Jawaban dari perwakilan Kota Banjar memberikan jawaban yang intinya sebagai berikut :

Di Banjar sudah tidak ada lagi Pungli dalam pelayanan di kelurahan/desa, dan telah mengikuti pelatihan dari Kementerian Dalam Negeri menjadi pendampingan desa-desa di Jogjakarta. Dalam pelatihan diajarkan untuk menghindari Pungli dalam melakukan pengurusan ke kantor pelayanan bisa menggunakan SPPD.

❖ Jawaban dari Kepala Desa Rancah Kabupaten Ciamis, memberikan jawaban yang intinya sebagai berikut :

Diharapkan kepada para pemegang kebijakan untuk datang ke desa selama 2 minggu pada bulan Syawal dan bulan Rayagung, akan dapat diketahui situasi yang ada di lapangan, bagaimana sulitnya melayani masyarakat.

❖ Jawaban dari Kepala Desa Karyamulya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, memberikan jawaban yang intinya sebagai berikut :

Dilema kepala desa selalu dipojokan sebenarnya menjadi korban, kesejahteraan kepala desa di setiap daerah berbeda, kalau ingin tidak ada Pungli kesejahteraannya dulu ditingkatkan. Selain itu, yang harus ditatar tidak hanya kepala desa dan aparat desa, tapi juga oknum yang melakukan tindakan pungli ke desa.

3. Bagaimana peran saya sebagai Kepala Pemerintahan di Desa / Kelurahan selaku Wakil Negara di Desa / Kelurahan dalam memberantas Pungli?

Jawaban

- ❖ Jawaban Sdr. Endan dari Desa Mangunjaya Kabupaten Pangandaran memberikan jawaban yang intinya sebagai berikut :

Dilema bagi kepala desa, seharusnya diupayakan minimal gaji kepala desa dan aparat desa dinaikkan, apabila kesejahteraannya terpenuhi maka Pungli di desa tidak akan ada, kalau memang masyarakatnya menuntut tidak adanya Pungli. Untuk menggunakan SPPD tidak memungkinkan karena anggaran yang terbatas, sehingga disampaikan pelayanannya gratis namun memerlukan biaya lainnya misalnya transportasi.

- ❖ Jawaban dari Kota Tasikmalaya, memberikan jawaban yang intinya sebagai berikut :

- Masalah tingkat kesejahteraan dan pola pikir masyarakat, kalau diberi imbalan kenapa harus ditolak, apakah itu bisa disebut Pungli atau tidak.
- Kaitan dengan tidak melaporkan adanya Pungli, contohnya di wilayah kota banyaknya pungutan preman (japrem), hanya memberikan pemahaman kalau tidak mau mendapatkan jatah tidak usah ikut-ikutan.

- ❖ Jawaban Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Parengpeng Kabupaten Ciamis memberikan jawaban yang intinya sebagai berikut :

- kepala desa dan aparat desa bukan pelaku Pungli, walapun ada itu adalah oknum, para kepala desa sudah bekerja semaksimal mungkin di desanya masing-masing;
- selama ini desa-desa dijadikan objek oleh oknum dari aparat pemerintah yang lebih tinggi yang datang ke desa untuk meminta jatah apabila dana desa telah cair, dan itu merupakan pungutan liar agar diberantas.

4. Hari ini saya selaku Kepala Desa / Kepala Kelurahan telah mendapatkan pencerahan tentang hal-hal yang terkait dengan Pungli dan permasalahan hukumnya, jelaskan langkah-langkah apa yang dapat di implementasikan dalam memberikan pelayanan terhadap warga sesuai tema “Dengan Sapu Bersih Pungli Kita Wujudkan Bekerja Tanpa Pungli”

❖ Jawaban dari aparat desa memberikan jawaban yang intinya sebagai berikut :

Satgas Saber Pungli agar memperhatikan aturan – aturan yang ada di atas termasuk di bagian-bagian pelayanan, kalau memang itu dikatakan cepat, tepat, dan tidak memerlukan biaya, pada kenyataannya pelayanan tidak benar-benar cepat, sehingga aparat desa membantu masyarakat untuk memperlancar untuk segera terlayani apalagi urusan kesehatan. Terkait adanya masyarakat yang memberikan imbalan, tidak boleh ditarget besarnya, walaupun pada kenyataannya memerlukan biaya untuk pengurusan.

❖ Jawaban Ibu Yuni Dormala Kepala Desa dari Kab. Tasikmalaya memberikan jawaban yang intinya sebagai berikut:

- akan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang arti Pungli yang sebenarnya, tetapi menjadi dilema terdesak kebutuhan, contoh urusan kesehatan, namun aparat desa tidak bisa bertindak apabila tidak mengeluarkan sesuatu untuk mempercepat pelayanan tersebut;
- akan berhenti memberikan sesuatu kepada oknum yang meminta jatah apabila dana desa telah turun, diharapkan agar Satgas Saber Pungli menindak oknumoknum tersebut.

Dari hasil diskusi atas materi tersebut, narasumber mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. terkait

1. terkait kesejahteraan dalam hal ini gaji aparat desa yang masih rendah sekitar Rp.3.100.000,- kesejahteraan tidak selalu dalam bentuk uang, ada yang rutin setiap bulan diberikan, ada yang sekali-kali dalam bentuk fasilitas / tunjangan, akan disampaikan kepada Gubernur untuk dipertimbangkan;
2. bahwa Pungli ada pada pelayanan publik, bisa di pemerintah bisa juga di BUMN / BUMD, oleh karenanya berbeda terminologinya dengan swasta, kalau aparat negara menerima fee namanya gratifikasi;
3. sosialisasi kedepan akan disimulasikan, dimana ada 5 pihak dalam pembangunan, yaitu pemerintah, akademisi, komunitas (LSM dan lainnya), dunia usaha, dan media, masing-masing kelompok menyampaikan argumennya dan berdebat (intelektual exercise), hasilnya akan disampaikan ke Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. setiap pungutan yang apabila tidak ada regulasinya itu Pungli, oleh karenanya apabila perlu dapat dibuat Peraturan Desa, namun harus sama dengan desa lain dan tidak bertentangan dengan peraturan yang di atasnya.

III. PENUTUP

Demikian hasil pelaksanaan Sosialisasi Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat kepada para Lurah dan Kepala Desa se-wilayah Priangan Timur di Kota Tasikmalaya dibuat sebagai pertanggungjawaban tugas.

Bandung, Juli 2019

SEKRETARIS II
SATGAS SABER PUNGLI PROV. JABAR

Dr. A. RUSMAN, S.H., M.H.
AKBP NRP 62070433

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
PROVINSI JAWA BARAT

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN SOSIALISASI SATGAS SABER PUNGLI
PROVINSI JAWA BARAT KEPADA PARA LURAH DAN KEPALA DESA SE-
WILAYAH PRIANGAN TIMUR DI KOTA TASIKMALAYA**



Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat bertempat di Hotel Santika Jl. Yudanagara Kec. Cihideung Tasikmalaya Jawa Barat



Registerasi peserta meliputi para Lurah dan Kepala Desa se-wilayah Priangan Timur dan UPP Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran, dan Kab. Banjar



Laporan Ketua Penyelenggara Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Prov. Jawa Barat yang diwakilkan kepada Sekretaris I Pokja Pencegahan Ir. Hemansyah, M.Si.



Sambutan Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Prov. Jawa Barat yang dibacakan oleh Sekretaris II AKBP Dr. A. Rusman, S.H., M.H.



Pembukaan dan Sambutan Walikota Tasikmalaya yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Bpk. Drs. H. Ivan Dicksan Hassanudin, M.Si. memberikan sambutan dalam kegiatan Sosialisasi Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat di Kota Tasikmalaya, sekaligus membuka acara Sosialisasi Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat



Peserta Sosialisasi Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat di Kota Tasikmalaya yang terdiri dari Para Lurah dan Kepala Desa se-wilayah Priangan Timur, serta UPP Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran, dan Kab. Banjar



Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Satgas Saber Pungli Prov. Jabar di Kota Tasikmalaya terdiri dari Ketua Kelompok Ahli Satgas Saber Pungli Prov. Jabar Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA, Sekretaris III Satgas Jaksa Madya Otong Hendra Rahayu, S.H., M.H., Kabid Ops Satgas AKBP Harso Pudjo Hartono, S.H. dengan moderator Sekretaris II Pokja Pencegahan AKBP Drs. Adie Sumarwan, S.S.T., M.K.



Paparan yang disampaikan oleh Kabid Ops Satgas Saber Pungli Prov. Jabar AKBP Harso Pudjo Hartono, S.H.



Paparan yang disampaikan oleh Sekretaris III Satgas Saber Pungli Prov Jabar Jaksa Utama Madya Otong Hendra Rahayu, S.H., M.H.



Paparan yang disampaikan oleh Ketua Kelompok Ahli Satgas Saber Pungli Prov. Jawa Barat Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA



Dilanjutkan dengan diskusi peserta sosialisasi dipandu oleh para narasumber terkait keberadaan Satgas Saber Pungli, pungutan dalam pelayanan masyarakat di kelurahan/desa, dan pengelolaan dana desa



Foto Bersama Peserta dan Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Satgas Saber Pungli Prov. Jabar di Kabupaten Cirebon yang berlokasi di Hotel Santika Jl. Yudanagara Kec. Cihideung Tasikmalaya Jawa Barat



**SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGLI
PROVINSI JAWA BARAT**

POKJA PENCEGAHAN

SATGAS SABER PUNGLI PROV. JABAR

**SOSIALISASI SATGAS
SABER PUNGLI
PROV. JABAR
DI KOTA TASIKMALAYA**



LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

BANDUNG, JULI 2019